

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.¹ Dewasa ini partai politik merupakan kendaraan politik untuk merebut dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Menurut Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.² Hal ini, dikarenakan partai politik merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan negara demokrasi, walaupun dalam negara otoriter terdapat partai politiknya juga tetapi mempunyai fungsi yang berbeda, karena partai politik mempunyai fungsi yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi untuk menjaga integritas politik didalam ruang lingkup masyarakat. Dengan adanya partai politik dapat mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu ilmuwan politik yaitu V.O. Key, Jr (1964) : “partai politik, setidaknya di kancah amerika cenderung menjadi kelompok khusus.... Dalam kumpulan pemilih secara keseluruhan, kelompok terbentuk dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai anggota partai... Dalam pengertian lain istilah partai bisa mengacu pada kelompok pekerja professional.... Kadang-kadang partai menunjukkan

¹ Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. hlm. 397.

² Ichlasul Amal. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana. hlm. XV

kelompok-kelompok dalam pemerintahan.... Sering kali partai mengacu pada suatu entitas yang termasuk salah satu dari partai di dalam pemilihan, kelompok politik profesional, partai di legislatif, dan partai di pemerintahan. Namun baik secara analitis dan operasional istilah ‘partai’ sering mengacu pada beberapa jenis kelompok dan kita perlu memperjelas makna dimana istilah ini digunakan.”³

Fungsi partai politik dalam negara demokrasi terdapat 4 sarana yang diutamakan yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik.⁴ Dari ke 4 fungsi partai politik tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam kehidupan politik terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi politik. Selain itu fungsi terpenting dalam partai politik yaitu melakukan rekrutmen politik, untuk kebutuhan internal partai dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun nasional.

Berbicara mengenai partai politik tidak akan terlepas dengan namanya demokrasi, karena partai politik dan demokrasi mempunyai keterkaitan satu sama lain yang saling berhubungan. Karena dalam pengertian demokrasi secara umum sendiri menyatakan bahwa pemimpin atau wakil rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga warga negara diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpinnya dengan cara bersaing dalam meraih suara dan

³ Richard S. Katz dan William Crotty. 2006. *Handbook Partai Politik*. London : SAGE Publications. hlm. 4

⁴ Miriam Budiardjo. *Op.Cit. Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm. 405-410

harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku dinegara tersebut. Dengan adanya kesempatan warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin politik, maka dengan hal inilah yang dinamakan dengan demokrasi.

Negara Indonesia sendiri menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan sebuah pemerintahannya, untuk sistem kepartaian Negara Indonesia sendiri menganut sistem multi partai dimana terdapat lebih dari dua partai yang telah diberikan kebebasan dalam mendirikan partai politik, hal ini mengakibatkan ketatnya persaingan dalam memperebutkan kursi di parlemen ataupun pemerintahan baik di tingkat lokal ataupun nasional.

Dalam pemilu 2019 terdapat 4 partai politik baru yang lolos dalam seleksi dan mendapatkan legitimasi hukum, sehingga dianggap sah sebagai partai politik di Indonesia. 4 partai politik baru ini diantaranya Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Garuda. Dengan adanya 4 partai politik baru ini menggambarkan bahwa kondisi politik yang terjadi dalam negeri telah mengalami peningkatan tidak seperti pada pemilu 2014 yang jumlah partai politiknya lebih sedikit daripada konstetasi politik yang akan diselenggarakan pada pemilu 2019.

Adanya 4 partai politik baru membuat konstetasi politik pada pemilu 2019 semakin kompetitif, terutama dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam pemilu 2019 ini dapat dikatakan mempunyai suasana konstetasi politik yang memanas dan sangat kompetitif, karena pemilihan calon anggota legislatif kali ini diadakan serentak bersamaan dengan

pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Yang menarik disini merupakan partai yang di pimpin oleh calon presiden Prabowo Subianto yaitu Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), karena menjadi suatu keuntungan untuk para calon anggota legislatif yang akan dicalonkan oleh Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), hal ini membawa pengaruh untuk menjadi daya tarik masyarakat dalam melihat sosok calon presiden tersebut yang berada didalam Partai Gerindra.

Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) berdiri pada tanggal 6 februari 2008 yang berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum untuk tahun 2009.⁵ Setelah mendeklarasikan menjadi partai politik dan telah mendapatkan legitimasi hukum, kemudian Partai Gerindra menjadi partai politik baru yang lolos ke parlemen pada saat itu, bahkan didaerah Kota Tasikmalaya yang terkenal dengan julukan sebagai kota santrinya merupakan daerah yang kuat dalam politik Islamnya namun Partai Gerindra dapat meloloskan kadernya dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Tasikmalaya walaupun hanya mendapatkan 1 kursi. Berikut 10 partai dari 38 peserta partai politik yang berhasil mendapatkan jatah kursi DPRD Kota Tasikmalaya pada tahun 2009 :

⁵ Diakses dari <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra#> pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:20 wib.

Tabel 1.1**Data Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2009 Kota Tasikmalaya**

NO	NAMA PARTAI	KURSI
1	Partai Persatuan Pembangunan	8
2	Partai Demokrat	8
3	Partai Amanat Nasional	7
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
5	Partai Golongan Karya	4
6	Partai Keadilan Sejahtera	4
7	Partai Bintang Reformasi	4
8	Partai Bulan Bintang	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1
10	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
Jumlah		45

Sumber : kota-tasikmalaya.kpu.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Partai Gerindra berhasil dalam menduduki kursi DPRD di Kota Tasikmalaya pada waktu itu yang dapat dikatakan masih sebagai partai politik baru, hal ini membuat Partai Gerindra patut diperhitungkan dalam sebuah konstetasi politik disuatu daerah, seperti Kota Tasikmalaya yang kuat dalam politik Islamnya. Karena hal ini terlihat dari perolehan kursi yang diraih PPP yang mencapai 8 kursi di DPRD, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik terhadap politik Islam dalam suatu partai. Namun Partai Gerindra mampu menunjukkan diri sebagai partai politik baru dengan persaingan yang kompetitif dan ambisi yang kuat dalam mengikuti pemilu pada tahun 2009.

Ketika pada pemilu legislatif DPRD Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 Partai Gerindra berhasil kembali mendapatkan kursi di DPRD Kota Tasikmalaya dan mengalami perkembangan, karena kursi yang didapatkan melebihi kursi yang diraih pada pemilu legislatif tahun 2009. Berikut 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di DPRD Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 :

Tabel 1.2

Data Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kota Tasikmalaya

NO	NAMA PARTAI	KURSI
1	Partai Persatuan Pembangunan	10
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
3	Partai Amanat Nasional	5
4	Partai Demokrat	5
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
6	Partai Golongan Karya	4
7	Partai Keadilan Sejahtera	4
8	Partai Bulan Bintang	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa	2
10	Partai Nasional Demokrat	1
Jumlah		45

Sumber : kota-tasikmalaya.kpu.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Partai Gerindra mengalami peningkatan dalam meraih kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini Partai Gerindra memiliki ambisi yang kuat untuk bersaing secara kompetitif, walaupun wilayahnya kuat dengan politik Islam. Maka dalam bersaing secara kompetitif disetiap daerah Partai Gerindra perlu melakukan rekrutmen dalam

memberikan calon-calon yang terbaik kepada masyarakat seperti pemilu legislatif di Kota Tasikmalaya Partai Gerindra selalu berhasil menempatkan perwakilannya dalam menduduki kursi DPRD. Seperti yang diungkapkan oleh Ichlasul Amal mengatakan rekrutmen merupakan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan: terbuka untuk masyarakat, badan legislatif pemerintah atau anggota partai yang lain, dan tentu saja, untuk berkompetisi secara baik dalam pemilihan.⁶

Maka Partai Gerindra akan melaksanakan rekrutmen politik dan akan merekrut caleg untuk pemilu tahun 2019 baik itu di DPR maupun DPRD dengan kualitas lebih baik dibandingkan pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Dalam melakukan rekrutmen politik tersebut, Partai Gerindra mempunyai AD/ART dalam menentukan calon anggota legislatif DPRD Kota/Kabupaten berdasarkan anggaran dasar partai yang terdapat di bab 5 pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi⁷ :

- a. Calon Pengurus Partai.
- b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁶ Ichlasul Amal. *Op.Cit.Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. hlm. 31

⁷ AD/ART Partai Gerindra. hlm.7

Berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh Partai Gerindra dengan mengutamakan kadernya terlebih dahulu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan merekrut seseorang yang mempunyai pengaruh didalam masyarakat ataupun seperti tokoh masyarakat yang siap terjun ke dunia politik. Karena hal ini tertera dalam anggaran rumah tangga Partai Gerindra di bab 1 pasal 5 ayat 2 yang mengatakan Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Luar Biasa sesuai strata kader berdasarkan prestasi yang luar biasa.⁸

Partai Gerindra mempunyai ambisi yang kuat dalam pemilu 2019, bahkan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Tasikmalaya. Menurut salah satu media elektronik yaitu Pojok Bogor mewawancarai Nandang Suryana selaku Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa Partai Gerindra menargetkan 10 kursi DPRD Kota Tasikmalaya, hal ini disebabkan karena mempunyai ambisi dalam merebut kursi ketua DPRD dari PPP.⁹ Sehingga Partai Gerindra harus bersaing secara kompetitif dalam memperebutkan kursi tersebut, walaupun PPP dalam dua kali pemilu legislatif selalu mendapatkan kursi terbanyak di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa Partai Gerindra telah menjadi salah satu partai besar dan mempunyai basis massa yang banyak di Indonesia dan Kota Tasikmalaya, karena melihat dari komposisi DPRD Kota Tasikmalaya

⁸ Ibid; 41

⁹ Diakses dari <https://bogor.pojoksatu.id/baca/begini-persiapan-para-parpol-di-tasikmalaya-merekrut-bakal-calon-legislatif> pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 15:20 wib.

pada tahun 2014 yang mengalami perkembangan. Dimana Partai Gerindra berhasil menempatkan posisi kelima dengan perolehan 4 kursi. Melihat dari komposisi Partai Gerindra diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pola rekrutmen Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) untuk Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya tahun 2019. Karena Partai Gerindra mempunyai ambisi politik yang kuat di pemilu legislatif 2019 dengan target dapat meraih 10 kursi dan merebut ketua DPRD dari PPP pada pemilu legislatif tahun 2019.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg DPRD Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tasikmalaya**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti itu :

Bagaimana pola rekrutmen Partai Gerindra dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif DPRD pada pemilu tahun 2019 di Kota Tasikmalaya ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat cakupan pembahasan mengenai rekrutmen politik sangat luas, maka penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra di tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari atau mengetahui lebih dalam tentang pola rekrutmen dengan menganalisis atau mendeskripsikan pola rekrutmen Partai Gerindra dalam penetapan Caleg DPRD pada pemilu tahun 2019 di Kota Tasikmalaya .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan partai politik dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi dalam mengevaluasi dari pelaksanaan rekrutmen partai politik Gerindra di kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Partai Politik

Sebelum menjelaskan partai politik, maka perlu memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Secara konteks yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan. Jadi dalam ilmu politik merupakan suatu hal untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.

Dalam partai politik ada tiga teori yang mencoba untuk menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.¹⁰ Kedua teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas.¹¹ Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹²

¹⁰ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. hlm.144

¹¹ Ibid;

¹² Ibid;

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Teori kedua menjelaskan bahwa krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur kompleks, perubahan-perubahan ini menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan untuk organisasi politik yang mampu memadukan

Partai politik merupakan suatu kendaraan politik yang menjadi bentuk wadah organisasi atau orang-orang yang mempunyai tujuan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan organisasi ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut jabatan politik yang sah dengan cara melalui konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya.¹³

¹³ Ibid; 144-146

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan dalam pasal 1 bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Dari beberapa definisi yang dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang bersifat resmi, yang mempunyai tujuan dalam memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum. Dengan adanya partai politik, dapat menjadi tepat wadah aspirasi bagi masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin secara langsung sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2. Peran Partai Politik

Partai Politik memiliki peran yang penting dalam menentukan sebuah sistem demokrasi modern. Partai politik merupakan tempat aspirasi masyarakat yang nantinya kepentingan dan nilai yang berkembang di dalam masyarakat itu disimpulkan dan membentuk regulasi yang menjadi

¹⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

rancangan Undang-Undang Negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan merupakan program bagi masyarakat.

Menurut Dwight King menjelaskan peran utama partai politik terbagi menjadi tiga macam, yaitu¹⁵ :

- a. Memberikan jembatan institusional warga negara dengan pemerintah.
- b. Menyeleksi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu.
- c. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik.

3. Tipologi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti tipologi partai politik merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam kenyataan, tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk tujuan memudahkan pemahaman, tipologi ini sangat berguna. Di bawah ini, akan menjelaskan tipologi partai politik menurut kriteria-kriteria tertentu.¹⁶

¹⁵ Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung : Alfabeta. hlm. 226

¹⁶ Ramlan Surbakti. *Op.Cit. Memahami Ilmu Politik*. hlm. 155

a. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

b. Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu massa dan partai kader. Yang dimaksud dengan partai politik massa merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi sebanyak-banyaknya. Sedangkan partai kader merupakan partai yang mengandalkan kualitas sumber anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

Namun selain partai massa dan partai kader, terdapat golongan partai *catch all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah *catch all* pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik partai-partai di Eropa Barat pada masa pasca perang dunia II. Partai *catch all* diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti

ideologi yang kaku. Dengan demikian, aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan¹⁷.

c. Basis Sosial dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu partai politik beranggotakan dari lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.

Suatu tipologi partai politik hendaknya didasarkan sebagai berikut¹⁸ :

- a. Sumber-sumber dukungan partai. Diajukan satu perbedaan dasar komprehensif lawan sectarian. Yang termasuk dalam komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut berusaha mendapatkan suara terbanyak. Sedangkan partai-partai sectarian adalah partai-partai yang memakai kelas atau ideologi sebagai daya tariknya. Tetapi dua tipe ini tidak sepenuhnya sesuai realitas.
- b. Organisasi Internal. Dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotannya terbatas atau partai yang menggunakan kualifikasi ketat dalam keanggotannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang

¹⁷ Ichlasul Amal. *Op.Cit. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. hlm.xviii

¹⁸ Ibid; 34

membolehkan setiap orang menjadi anggota dan memiliki persyaratan yang ringan bagi keanggotannya.

- c. Cara-cara bertindak dan fungsi. Partai yang terspesialisasi menekankan keterwakilan, agregasi, partisipasi, serta control terhadap pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode tertentu. Sedangkan untuk partai yang menyebar menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

4. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu hal yang penting dalam penguatan pelembagaan partai politik. Apabila terjadi kegagalan dalam melakukan fungsi partai politik, maka akan dinyatakan berhenti menjadi partai politik. Karena fungsi rekrutmen politik ini merupakan fungsi terpenting dalam partai politik dan tidak mungkin untuk ditinggalkan oleh partai politik. Hal ini dikarenakan partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat dan aktif sebagai anggota partai politik. Bahkan untuk mengusahakan menarik generasi muda untuk dididik menjadi kader partai, sehingga memberikan potensi untuk menggantikan pemimpin lama. Kemudian kader tersebut diikutsertakan bersaing dengan partai-partai lain untuk memperebutkan kursi di parlemen, dan jabatan pemerintahan lainnya.

Menurut Ramlan Surbakti rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁹

Perlakuan politik secara keseluruhan mempunyai tahap-tahap dalam melakukan rekrutmen politik, karena hal ini mempunyai keterkaitan terhadap bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting dalam Rekrutmen politik yaitu, Kandidat yang dinominasikan, penyeleksi, posisi kandidat diseleksi dan proses pemilihan kandidat. Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara itu, pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat.²⁰

Dalam rekrutmen politik, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam kondisi ekstrim, selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.²¹

Sementara itu, untuk menjawab dimana posisi kandidat diseleksi, menurut Hazan tempat kandidat itu diseleksi terbagi kedalam dua tipe yaitu,

¹⁹ Ramlan Surbakti. *Op.Cit. Memahami Ilmu Politik*. hlm. 150

²⁰ Sigit Pamungkas. 2011. *Teori dan Praktek Partai Politik Indonesia*. Jakarta : Institute for Democracy and Welfarisme. hlm. 93

²¹ Ibid; 94

pertama sentralistik ialah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional. Kedua, desentralistik ialah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai.²² Namun untuk desentralistik terbagi menjadi dua jenis yaitu, desentralistik teritorial yang penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh elite partai lokal atau dari cabang semua partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan, kemudian desentralistik fungsional ialah ketika seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok kelompok dagang, perempuan, minoritas dan sebagainya.

Dalam hal menjelaskan tentang bagaimana kandidat dinominasikan, terdapat dua model dalam menominasikan kandidat menurut Rahat dan Hazan yaitu, pertama model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Kedua, model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.²³

²² Ibid; 98

²³ Ibid; 99

Menurut Almond dan Powell. Rekrutmen politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.

Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu :²⁴

- a. Prosedur tertutup artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang
- b. Prosedur terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil. Di dalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:
 - 1) Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam

²⁴ Noor Asty Baalwy. 2012. *Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar*. (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin). hlm. 15

perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan partai-partai tertentu.

- 2) Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham powell menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi kesimpulanya

setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

- 3) Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”.

Menurut Suharno rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.²⁵ Suharno, dalam hal rekrutmen politik terdapat dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar

²⁵ Inu Kencana Syafie. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka RekaCipta. Hlm. 58

sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Menurut Firmanzah menjelaskan selain merekrut, didalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait sejarah, visi, misi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan dan negara.²⁶

Pola rekrutmen politik harus dilaksanakan oleh semua partai politik baik itu di negara penganut paham demokrasi ataupun penganut paham komunis. Dalam negara penganut paham demokrasi itu sendiri untuk melaksanakan pola rekrutmen politik akan berbeda satu sama lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial atau subsistem yang dilakukan oleh negara tersebut. Sehingga rekrutmen politik merupakan suatu hal yang penting untuk setiap partai politik, apabila rekrutmen politik tidak berjalan semestinya maka dapat dikatakan partai politik tersebut berhenti menjadi partai politik.

²⁶ Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor. hlm. 71

Partai politik yang telah melakukan pola rekrutmen politik, kemudian diperlukan adanya kaderisasi untuk mendidik kader-kader dalam mengembangkan kualitasnya dalam keterampilan dan keahlian berpolitiknya. Hal ini akan berdampak untuk meregenerasi didalam tubuh partai politik itu sendiri, karena kader yang memiliki potensi terbaik akan menggantikan pemimpin lama. Bahkan kader-kader tersebut akan diikutsertakan dalam bersaing dengan partai-partai politik lainnya dalam memperebutkan kursi diparlemen ataupun jabatan politik yang sah.

B. Penelitian Terdahulu

Rekrutmen politik merupakan suatu kebutuhan di partai politik dalam mencari kandidat-kandidat yang memiliki potensial dan membentuk suatu individu menjadi lebih baik yang sesuai dengan visi dan misi partai politik tersebut. Maka rekrutmen politik harus tetap berjalan agar partai politik dapat menjalankan salah satu fungsinya dengan baik, bahkan apabila rekrutmen tidak dilakukan oleh partai politik akan dianggap berhenti menjadi partai. Oleh karena itu rekrutmen politik sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam sehingga dapat mengetahui mekanisme dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan.

Berkaitan dengan penelitian mengenai rekrutmen partai politik dan untuk menunjang penelitian tersebut, penulis melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian Kaswan Try Poetra mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan (2013) dengan

judul “ *Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Polewali Manda*”.

Bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Kaswan Try Poetra (2013) menjelaskan tentang bagaimana perbandingan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014. Pola rekrutmen bacaleg yang ditemukan oleh Kaswan Try Poetra di PDI-Perjuangan terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur khusus dan jalur umum, secara ringkas jalur khusus ini merupakan kandidat yang mempunyai keilmuan dan mempunyai pengaruh didalam suatu masyarakat atau yang dikenal tokoh masyarakat sedangkan untuk jalur umum bagi calon legislatif yang baru ialah bukan dari kader partai. Akan tetapi, disini mendapatkan pertimbangan dahulu apabila terdapat kader yang mempunyai loyalitas tinggi akan lebih diprioritaskan terlebih dahulu untuk meminimalisir konflik internal yang akan terjadi.

Pola rekrutmen bacaleg yang ditemukan Partai Demokrat juga mengutamakan berasal dari kader partai yang mempunyai loyalitas tinggi dan untuk dari non kader orang yang mempunyai pengaruh didalam lingkungan masyarakat atau dikenal dalam lingkungan masyarakat, bahkan harus mempunyai keilmuan. Maka kedua partai ini mempunyai pola-pola rekrutmen proses bacaleg yang tidak hampir jauh berbeda, akan tetapi tidak dapat dikatakan sama. Karena setiap partai memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing seperti PDI-Perjuangan mencari caleg yang diprioritaskan terlebih dahulu dari internal partai ketimbang eksternal partai untuk

meminimalisir konflik internal yang akan terjadi nantinya dan mengandalkan caleg yang lebih berpengalaman dikarenakan telah teruji kinerjanya dan dapat memobilisasi suara masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan kurangnya regenerasi caleg, karena lebih memprioritaskan caleg dengan muka lama.

Sedangkan untuk Partai Demokrat mempunyai kelebihan yang lebih mengutamakan caleg-caleg muda, karena mempunyai pemikiran yang inovatif dan memprioritaskan kader internal yang telah melalui pendidikan dan telah ikut bersama-sama dalam membesarkan partai. Akan tetapi, hal ini memberikan kekurangan dalam Partai Demokrat karena mengandalkan caleg-caleg muda akan berdampak ketingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg muda yang terkesan kurang mengakar di masyarakat. Bahkan biaya politik masih tinggi dan masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, hal ini terkesan membuat rekrutmen tertutup dan mengutamakan jalur khusus yang menutup peluang bagi masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam hal menjadi caleg di pemilu 2014.

Kemudian hasil penelitian Noor Asty Baalwy mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan (2012) dengan judul “*Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar*”. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor Asty Baalwy (2012) menjelaskan tentang bagaimana Pola Rekrutmen Politik Partai NasDem Kota Makassar Dalam Menghadapi Pemilu 2014. Partai NasDem ini terbilang masih baru dalam menjelang pemilu 2014, karena sebelumnya Partai NasDem sudah

berdiri sebelum terbentuk menjadi partai dahulunya NasDem merupakan ormas NasDem dibentuk berdasarkan kesadaran untuk membantu masyarakat dari aspek kehidupan. Maka pada tahun 2011 NasDem resmi menjadi partai politik dan mempunyai konsep restorasi Indonesia. Walaupun dahulunya adalah ormas tetap Partai NasDem memerlukan rekrutmen politik.

Partai NasDem sebagai partai politik baru juga memiliki pola rekrutmen politik, yang memfokuskan rekrutmennya bertujuan sebagai kaderisasi anggota partai dengan tujuan mendapatkan suara di pemilu 2014. Maka rekrutmen anggota Partai NasDem dilakukan dengan cara persuasif yaitu dengan melakukan sosialisasi partai terhadap masyarakat Kota Makassar untuk menunjukkan eksistensi partai dalam menghadapi pemilu 2014. Sehingga sistem yang digunakan dalam melakukan rekrutmen politik terdapat dua sistem yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam menerima kader partai, sehingga penerimaan kader partai terbuka tanpa memandang status, kekayaan, jabatan, dll. Kedua, sistem rekrutmen tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik di internal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Hal ini membuat calon yang mendaftar hanya berdasarkan elit Partai NasDem, sehingga menjadi kekurangan dalam sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem. Karena persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum dengan hal ini membuat hanya kalangan elit politik saja yang mengetahuinya.

Tabel 2.1

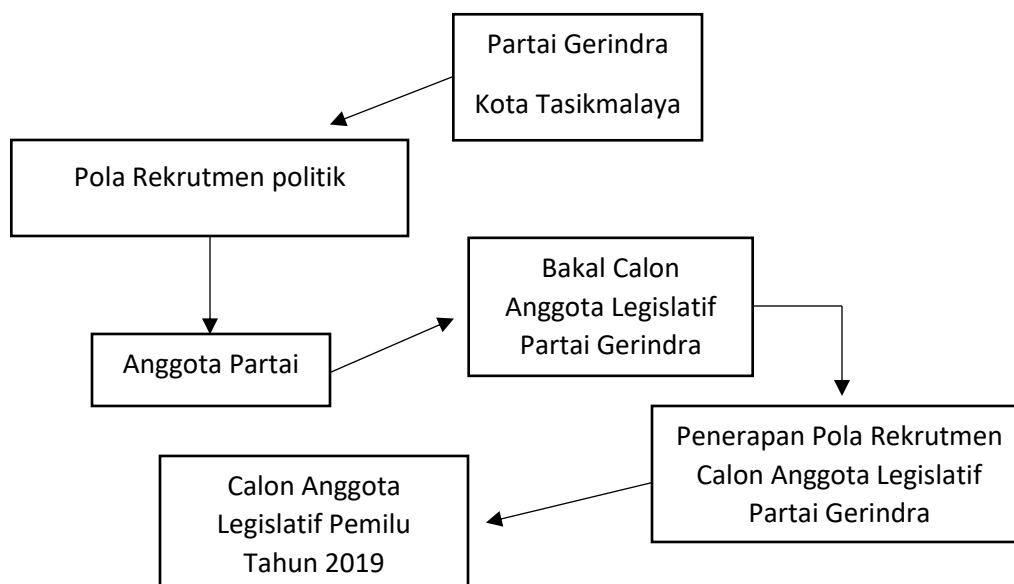
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kaswan Try Poetra (2013) dengan judul “Perbandingan Rekrutmen PDI- Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Manda”	Dalam isi penelitiannya lebih menjelaskan tentang perbandingan pola rekrutmen calon legislatif PDI- Perjuangan dengan Partai Demokrat	Persamaan penelitian yakni bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik	Perbedaan penelitian dengan Kaswan terletak pada lokasi penelitian, partai politik yang akan diteliti dan rekrutmen anggota partai politik yang akan ditelitinya.
2	Noor Asty Baalwy (2015) dengan	Dalam isi penelitiannya lebih	Persamaan penelitian yakni	Perbedaan penelitian

judul “Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar”	menjelaskan terhadap sistem rekrutmen anggota partai dan calon legislatif.	bagaimana sistem rekrutmen politik terhadap anggota partai dan calon legislatif dalam menghadapi pemilu	dengan Noor terletak pada lokasi penelitian, dan partai politik yang akan ditelitinya
--	--	---	---

C. Kerangka Pemikiran

Alur Kerangka Pemikiran



Sebagai salah satu penopang demokrasi, untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pemilu untuk memilih wakilnya

diparlemen. Bahwa partai politik dipandang sebagai lembaga formal yang mempunyai hak istimewa yaitu dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui legitimasi yang sah secara konstitusi. Maka partai politik membutuhkan kader-kader partai yang berkualitas dan berintegritas tinggi agar dapat menjalankan partai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai partai politik. Sehingga partai politik harus melakukan rekrutmen politik yang merupakan fungsi terpenting dalam partai politik.

Dalam hal ini partai politik mempunyai cara tersendiri dalam menentukan pola rekrutmen yang dilakukan oleh suatu partai. Karena setiap partai mempunyai pola rekrutmen yang berbeda-beda, akan tetapi tidak menutup kemungkinan memiliki kesamaan. Oleh karena itu pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh suatu partai dapat memberikan informasi tentang partai tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pada prinsipnya penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis dan diungkapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil kualitatif peneliti lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷

Tujuannya adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang peranan seorang individu dalam lingkungan tertentu serta dalam bidang tertentu, mengungkapkan pandangan, motivasi serta ambisinya selaku individu melalui sebuah tindakan.

²⁷ Sugiyono. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif r&d*. Bandung : Alapbeta. hlm.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tasikmalaya.

C. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dan anggota Partai Gerindra Kota Tasikmalaya untuk mengetahui bagaimana berjalannya pola rekrutmen partai politik Gerindra. Sedangkan untuk kajian penelitian ini penggunaan informan yang akan dimintai keterangan oleh peneliti akan di sinkronkan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan oleh peneliti.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada bagaimana rekrutmen partai politik Gerindra di tingkat Dewan Pimpinan Cabang.

Adapun fokus penelitian lainnya dalam penelitian ini adalah :

1. Membatasi bidang studi
2. Untuk dapat memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk dan keluar suatu informasi yang baru diperoleh dengan adanya suatu fokus penelitian, seorang peneliti akan dapat mengetahui dengan pasti data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana yang walaupun mungkin menarik tetapi tidak relevan dengan kondisi pada saat ini.

E. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, hal ini dikarenakan penulis melihat dari sebuah konsep yang digunakan pada latar belakang permasalahan apa yang mendeskripsikan tentang sebuah peranan seorang individu atau peranan sebuah kelompok, dan pendekatan penelitian studi kasus ini adalah sebuah pendekatan yang menceritakan sebuah kejadian atau permasalahan yang sedang terjadi, sudah terjadi ataupun yang masih terikat oleh ruang dan waktu.

F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai suatu jenis penelitian kualitatif, studi kasus rekrutmen partai politik Gerindra di tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu hal yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal melalui responden yang lebih mendalam dan juga tugas respondennya sedikit atau kecil.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial

yang terjadi di lokasi kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan atau melengkapi data yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam hal menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan oleh sipeneliti dengan melakukan studi literatur, foto atau dokumen dalam bentuk dokumen pribadi atau pun dokumen resmi lainnya yang bersangkutan dengan sebuah permasalahan yang diteliti untuk menunjang sebuah permasalahan yang akan diteliti.

G. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data utama yang diperoleh dari informan, seperti wawancara langsung kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Kota Tasikmalaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data utama yang diperoleh melalui sebuah dokumen atau arsip yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Penetapan Informan

Dalam teknik penetapan informan ini penulis menggunakan teknik penetapan informan *purposive sampling* (tujuan) dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan atau penarikan informan atau sample berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sample yang

disesuaikan atau yang dianggap mengetahui tentang maksud atau tujuan atau tema penulis.

Snowball sampling adalah penarikan atau pemilihan informan atau sample dimana responden pertama dipilih dengan menggunakan sebuah metode probabilitas, dan kemudian responden berikutnya diperoleh dari hasil informasi.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan analisis interaktif.

1. Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh.

2. Data *Rediction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dalam memproduksi data atau menyeleksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kelebihan dan keleluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi.

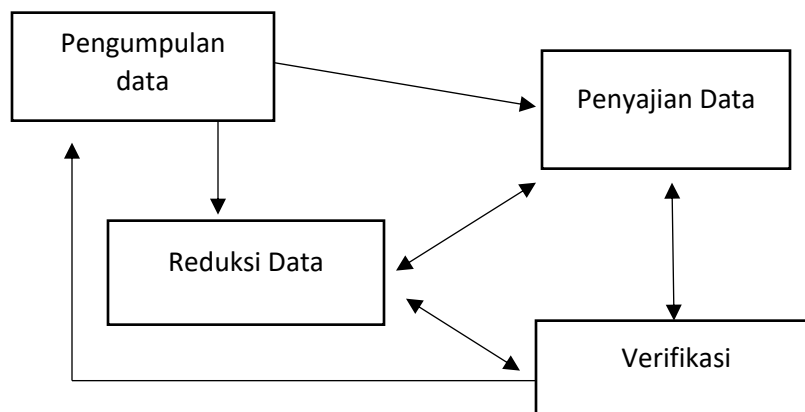
3. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan cara uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses mencari arti data, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Verifikasi merupakan kegiatan pengujian kebenaran, kekokohnya, sehingga data yang diperoleh jelas kebenarannya dan kegunaannya. Apabila dilihat dalam sebuah bagan, maka metode analisis dapat digambarkan sebagai berikut :

Metode Analisis Data Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (1992)²⁸

²⁸ Ibid; 224

J. Validitas Data

Untuk validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintai kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut.

Pada umumnya teknik triangulasi data yang paling banyak dilakukan dalam suatu penelitian ialah pemeriksaan dan pemanfaatan penggunaan sumber lainnya. Dengan demikian akan lebih banyak menggunakan teknik triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan berbagai sumber. Triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan berbagai jalan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikata orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti : rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dari kelima jalan dalam proses triangulasi sumber tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan jalan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data.